

TESIS
PELAKSANAAN KETENTUAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA JABATAN
NOTARIS DI KOTA PADANG

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan
pada Program Pascasarjana Universitas Andalas



DOSEN PEMBIMBING :
1. Prof. Zainul Daulay.,S.H.,M.H,
2. Neneng Oktarina., S.,H.,M.H,

FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
2018

PELAKSANAAN KETENTUAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA JABATAN NOTARIS DI KOTA PADANG

(Hafiz Irham, 1520123096, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 91 hlm)

ABSTRAK

Akta notaris pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris serta memberikan akses. Dalam hal ini kita bisa mengetahui apakah isi dari kandungan dalam akta notaris tersebut telah bisa berjalan semestinya atau tidak tentang pelaksanaannya dilapangan bagaimana dan disinilah kita bisa menemukan berbagai permasalahan yang di hadapi oleh si notaris tersebut dan tersandung kasus hukum dan oleh sebab itulah Permasalahan tersebut melahirkan rumusan masalah; 1) Bagaimana Pelaksanaan Pemberhentian Sementara Notaris dari Jabatannya? 2) Bagaimana konsekuensi Hukum terhadap pelaksanaan pemberhentian sementara jabatan notaris di kota padang?. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Deskriptif analisis, bersifat perspektif analisis dengan objek kajian meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Sumber data utama dalam penelitian hukum Deskriptif analisis adalah data lapangan dan bahan undang-undang. Teknik pengkajian dan pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi dokumenter, berkaitan dengan pelaksanaan pemberhentian sementara jabatan notaris di Kota Padang. Dari hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemberhentian sementara jabatan notaris tersebut pihak dari MPD melakukan rapat internal terlebih dahulu mengenai notaris yang bermasalah tersebut lalu berkas nya diajukan ke MPD dan MPW pun melakukan rapat internal juga untuk diajukan ke MPP sampai akhirnya di mentri hukum dan HAM dan konsekuensi hukum terhadap proses pemberhentian sementara jabatan notaris yang dilapangnya adalah si notaris tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasanya notaris normal dan terjadinya kendala lambatnya turun surat keputusan dari kementrian Hukum dan HAM mengenai status hukum berupa sangsi kode etik si notaris tersebut .

Kata Kunci : Notaris, pemberhentian sementara, konsekuensi hukum.

IMPLEMENTATION OF TERMINATION OF TEMPORARY CEREMONIES IN PADANG CITY

(Hafiz Irham, 1520123096, Master Program of Notary of Law Faculty of Andalas University
of Padang, 91 pp.

ABSTRACT

The notarial deed essentially contains formal truth in accordance with what the parties notify the notary. However, a Notary has an obligation to include that what is contained in a notarial deed is fully understood and in accordance with the will of the parties by reading it so that it becomes clear the contents of notary deed and granting access. In this case we can know whether the contents of the content in the notary deed has been able to run properly or not about the implementation of the field how and where we can find the various problems faced by the notary and stumbled the case law and that is why the problem gave birth to the formula problem; 1) How is the Implementation of Temporary Removal of Notary from Jabatannya? 2) What are the legal consequences for the temporary dismissal of the notary office in Padang City ?. Methods The research used is legal research Descriptive analysis, the perspective of analysis with the object of study include legal principles, legal systematic, legal history, and comparative law. The main data source in legal research Descriptive analysis is field data and material legislation. Technique of studying and gathering of legal material by using documentary study, related to the execution of temporary termination of office of notary in Padang City. From the result of the research and discussion it is concluded that in the implementation of the temporary discharge of the notary's office the party from the MPD holds an internal meeting prior to the notary in question and then submits the file to the MPD and MPW also holds an internal meeting as well as to be submitted to the MPP until finally in law and Human rights and legal consequences to the temporary dismissal process of his notary office is that the notary can not perform activities as normal notary normally and the obstacle of slow down decree from the Ministry of Law and Human Rights regarding the legal status of the notarial code's sanction code.

Keywords: Notary, temporary dismissal, legal consequences